

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk menganalisis idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada tindak pidana mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian *statute approach* dan *case approach*. Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Adapun dari ketiga Undang-Undang tersebut, sanksi pidana maksimal yang dapat diterapkan terhadap pelaku yakni 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak enam miliar rupiah. Kemudian analisis terhadap bentuk dakwaan ideal bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim yaitu dakwaan kumulatif dengan alasan agar pelaku mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan hanya diancamkan dakwaan alternatif. Jika diurutkan berdasarkan ketentuan sanksi pidana terberat, maka urutan yang sesuai adalah Pasal 9 *Jo.* Pasal 35 UU Pornografi, Pasal 4 *Jo.* Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) *Jo.* 45 ayat (1) UU ITE. Hal ini penting karena terdakwa dapat dikenakan pidana yang lebih berat lagi dengan harapan hal yang memberatkan ini bisa mengurangi jumlah kasus mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi.

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Video Pornografi, UU ITE

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the setting of sanctions for perpetrators who distribute and trade pornographic videos in Indonesian laws and regulations and to analyze the ideal form of indictment applied to the crime of distributing and trading pornographic videos. This research uses normative legal research with a statute approach and case approach. The results of the study show that the regulation of sanctions for perpetrators who distribute and trade pornographic videos in Indonesian laws and regulations is regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, and the ITE Law. As for the three laws, the maximum criminal sanction that can be applied to the perpetrator is 12 years in prison and/or a maximum fine of six billion rupiah. Then the analysis of the ideal form of indictment for perpetrators who distribute and trade pornographic videos in the East Jakarta District Court Decision No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim, namely cumulative indictments on the grounds that the perpetrators receive a heavier criminal threat than only being threatened with alternative charges. If sorted based on the provisions of the heaviest criminal sanctions, then the appropriate order is Article 9 Jo. Article 35 of the Pornography Law, Article 4 Jo. Article 29 of the Pornography Law and Article 27 paragraph (1) Jo. 45 paragraph (1) of the ITE Law. This is important because the defendant can be subject to even more severe penalties in the hope that this aggravating thing can reduce the number of cases of distributing and trading pornographic videos.*

**Keywords: Indictment, Pornographic Videos, ITE Law**